

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104°18' - 105°12' Bujur Timur dan 5°05' - 5°56' Lintang Selatan. Luas wilayah 3.356,61 km² yang meliputi wilayah daratan maupun perairan. Satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus yaitu Teluk Semaka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Way Sekampung dan Way Semaka. Selain itu Wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran pegunungan dengan temperatur udara yang sejuk dengan rata-rata 28°C.

Kabupaten Tanggamus memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Tanggamus membawahi 28 kecamatan yang memiliki luas keseluruhan sebesar 3.356,61 km persegi. Dipilihnya Kota Agung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus dengan pertimbangan bahwa Kota Agung memiliki syarat-syarat untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari serta kemungkinan terbukanya peluang memperoleh akses informasi yang lebih besar.

Berikut adalah tabel luas wilayah Kabupaten Tanggamus perkecamatan :

TABEL 3.1
LUAS KABUPATEN TANGGAMUS
DIRINCI PER KECAMATAN TAHUN 2007

No	Kecamatan (Nama)	Luas (km ²)	Persentase (Ha)
1	Wonosobo	307,75	30.775
2	Semaka	170,9	17.090
3	Bandar Negeri Semoung	-	-
4	Kota Agung	76,93	7.693
5	Pematang sawa	185,29	18.529
6	Kota Agung Barat	73,33	7.333
7	Kota Agung Timur	101,3	10.130
8	Pulau Panggung	623,56	62.356
9	Ulu Belu	323,08	32.308
10	Air Naningan	-	-
11.	Talang Padang	45,13	4.513
12.	Sumberejo	56,77	5.677
13.	Gisting	32,53	3.253
14.	Gunung Alip	25,68	2.568
15.	Pugung	232,4	23.240
16.	Pagelaran	163,55	16.355
17.	Sukoharjo	71	7.100
18.	Adiluwih	65,4	6.540
19.	Banyumas	30,62	3.062
20.	Pringsewu	44,29	4.429
21.	Ambarawa	22,76	2.276
22.	Gadingrejo	69,57	6.957
23.	Pardasuka	85,64	8.564
24.	Bulok	-	-
25.	Cukuh Balak	133,76	13.376
26.	Kelumbayan	174,76	17.476
27.	Limau	240,61	24.061
28.	Kelumbayan Barat	-	-
	Jumlah	3.356,61	335.661

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah pegunungan karena memiliki tiga buah gunung yaitu Gunung Tanggamus dengan tinggi 2.102 m

dpl terletak di Kecamatan Kotaagung, Gunung Pematang Halupan dengan tinggi 1.646 m dpl terletak di Kecamatan Wonosobo, dan Gunung Rindingan dengan tinggi 1.508 m yang terletak di Kecamatan Pulau Panggung.

Berdasarkan Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008, Kabupaten Tanggamus juga merupakan daerah rawa karena terletak di tepi Teluk Semangka yang juga dialiri oleh sungai-sungai dengan panjang masing-masing antara lain :

1. Way Sekampung : 256,00 km
2. Way Pisang : 21,00 km
3. Way Gatal : 34,00 km
4. Way Semah : 23 km
5. Way Sengharus : 37,00 km
6. Way Bulok : 40,00 km
7. Way Semangka : 90,00 km
8. Way Semong : 40,00 km

Kabupaten Tanggamus terletak di tepi Teluk Semaka, berikut tabel tinggi beberapa kota dari permukaan laut di Kabupaten Tanggamus :

TABEL 3.2
TINGGI BEBERAPA KOTA DARI PERMUKAAN LAUT DI KABUPATEN TANGGAMUS

No	Nama Kota	Tinggi dari permukaan laut (m)
1	Kotaagung	10
2	Gisting	480
3	Pringsewu	50
4	Wonosobo	50

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

3.1.2. Keadaan Penduduk/ Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus berdasarkan jenis kelamin dan *sex ratio* pada tahun 2007 berjumlah 863.492 jiwa yang terdiri dari 453.333 jiwa laki-laki dan 410.159 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 101,11. Berikut tabel banyaknya penduduk Kabupaten Tanggamus dirinci menurut jenis kelamin dan *sex ratio* sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 :

TABEL 3.3
BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN TANGGAMUS DIRINCI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO TAHUN 1990 S/D 2007

No	Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
1.	1990	399.613	379.029	778.642	105,43
2.	1991	402.961	358.899	761.860	112,28
3.	1992	374.996	375.062	750.058	99,98
4.	1993	403.509	385.780	789.289	104,60
5.	1994	405.295	388.219	793.514	104,40
6.	1995	407.054	393.064	800.118	103,56
7.	1996	407.101	393.286	800.387	103,51
8.	1997	408.422	394.861	803.283	103,43
9.	1998	410.247	399.338	809.585	102,73
10.	1999	414.375	402.901	817.276	102,85
11.	2000	415.398	384.813	800.211	107,95
12.	2001	422.298	378.102	800.400	111,69
13.	2002	415.581	385.328	800.909	107,85
14.	2003	432.207	396.425	828.632	109,03
15.	2004	435.011	398.736	833.747	109,10
16.	2005	438.018	399.337	837.355	109,69
17.	2006	460.761	398.119	858.880	115,73
18.	2007	453.333	410.159	863.492	110,53

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

Persebaran penduduk di Kabupaten Tanggamus tidak merata pada setiap kecamatan. Terdapat kecamatan yang jumlah penduduknya mencapai 77.012 jiwa yaitu Kecamatan Pringsewu dan terdapat pula kecamatan yang

jumlah penduduknya dibawah 10.000 jiwa yaitu Kecamatan Kelumbayan Barat (8.143 jiwa).

TABEL 3.4
PENDUDUK KABUPATEN TANGGAMUS PERKECAMATAN MENURUT
JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO TAHUN 2007

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Sex Ratio
1.	Wonosobo	18.873	17.075	110.53
2.	Semaka	17.703	16.017	110.52
3.	Bandar Negeri Semuong	8.519	7.708	110.52
4.	Kotaagung	19.347	17.505	110.52
5.	Pematang Sawa	8.340	7.546	110.52
6.	Kotaagung Timur	8.784	7.947	110.53
7.	Kotaagung Barat	8.352	7.556	110.53
8.	Pulaupanggung	15.173	13.728	110.53
9.	Ulubelu	18.289	16.547	110.53
10.	Air Naningan	12.946	11.713	110.53
11.	Talangpadang	22.125	20.019	110.52
12.	Sumberejo	15.626	14.138	110.52
13.	Gisting	17.943	16.235	110.52
14.	Gunung Alip	9.216	8.338	110.53
15.	Pugung	27.129	24.546	110.52
16.	Pagelaran	30.186	27.311	110.53
17.	Sukoharjo	22.130	20.022	110.53
18.	Adiluwih	16.940	15.327	110.52
19.	Banyumas	9.301	8.415	110.52
20.	Pringsewu	40.431	36.581	110.53
21.	Ambarawa	14.264	12.906	110.52
22.	Gadingrejo	35.018	31.682	110.53
23.	Pardasuka	15.702	14.206	110.52
24.	Bulok	10.433	9.439	110.52
25.	Cukuhbalak	10.853	9.819	110.52
26.	Kelumbayan	6.505	5.885	110.52
27.	Limau	8.930	8.080	110.52
28.	Kelumbayan Barat	4.275	3.868	110.52
Jumlah		453.333	410.159	110.53

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

3.1.3. Keadaan Kegamaan

Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan dibidang material semata, tetapi juga kemajuan dalam bidang mental spiritual. Hal ini dapat diwujudkan apabila pemahaman agama semakin baik dan inklusif oleh masing-masing pemeluknya dengan terpenuhinya segala kebutuhan rohani umat melalui ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah.

Pembangunan kehidupan beragama sangat penting dalam rangka pembangunan mental dan spiritual untuk menciptakan kualitas manusia yang berakhlak dalam kehidupan yang semakin kompleks. Tumbuhnya iman dan takwa dengan harapan terbangunnya rasa toleransi agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus tahun 2008, pemeluk Agama Islam berjumlah 842.763 jiwa, pemeluk Kristen Protestan berjumlah 11.291 jiwa, pemeluk Kristen Katholik berjumlah 3.681 jiwa, pemeluk Agama Hindu 4.114, pemeluk Agama Budha berjumlah 1.214 jiwa, dan lain-lain berjumlah 429 jiwa.

Tabel mengenai banyaknya pemeluk agama perkecamatan Kabupaten Tanggamus pada halaman berikutnya.

TABEL 3.5
BANYAKNYA PENDUDUK KABUPATEN TANGGAMUS
PERKECAMATAN MENURUT PEMELUK AGAMA TAHUN 2007

No	Kecamatan	Islam (Jiwa)	Kristen (Jiwa)	Katholik (Jiwa)	Hindu (Jiwa)	Budha (Jiwa)	Lain- Lain (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Wonosobo	34.990	317	96	517	16	12	35.948
2	Semaka	33.342	25	341	12	-	-	33.720
3	Bd. Negeri Semuong	16.207	7	13	-	-	-	16.227
4.	Kotaagung	36.087	18	204	300	243	-	36.852
5.	Pematang Sawa	15.865	15	6	-	-	-	15.886
6	Kotaagung Timur	16.220	328	159	159	24	-	16.731
7	Kotaagung Barat	15.903	3	-	-	2	-	15.908
8	Pulaupanggung	28.604	198	99	99	-	-	28.901
9	Ulubelu	34.761	23	46	46	-	-	34.836
10	Air Naningan	24.494	102	49	49	6	-	24.659
11	Talangpadang	41.970	33	79	79	62	-	42.144
12	Sumberejo	29.190	490	65	65	-	-	29.764
13	Gisting	32.449	1.182	379	379	143	-	34.178
14	Gunung Alip	17.554	-	-	-	-	-	17.554
15	Pugung	51.521	79	62	62	-	3	51.675
16	Pagelaran	54.958	1.423	150	150	136	73	57.497
17	Sukoharjo	37.905	2.234	594	594	184	270	42.152
18	Adiluwih	32.043	101	36	36	47	-	32.267
19	Banyumas	17.417	6	170	170	-	-	17.716
20	Pringsewu	73.413	2.799	700	700	75	25	77.012
21	Ambarawa	24.892	1.259	221	221	227	0	27.170
22	Gadingrejo	65.383	472	193	623	25	4	66.700
23	Pardasuka	29.731	101	7	10	20	39	29.908
24	Bulok	19.872	-	-	-	-	-	19.872
25	Cukuhbalak	20.672	-	-	-	-	-	20.672
26	Kelumbayan	12.178	68	9	128	4	3	12.390
27	Limau	16.999	8	3	-	-	-	17.010
28	Kelumbayan Barat	8.143	-	-	-	-	-	8.143
Jumlah		842.763	11.291	3.681	4.114	1.214	429	863.492

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

Sarana peribadatan sampai dengan tahun 2007 untuk Masjid berjumlah 948 buah, Mushola/Langgar 878, Gereja 48 buah, Pura 9 buah dan Klenteng berjumlah 5 buah.

TABEL 3.6
BANYAKNYA TEMPAT IBADAH DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007

No	Sarana Ibadah (Nama)	Jumlah (Unit)
1	Masjid	948
2	Mushola/ Langgar	878
3	Gereja	48
4	Pura	9
5	Klenteng	5
Jumlah		1888

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

3.1.4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan global dewasa ini, karena pendidikan merupakan modal dasar dan sebagai sarana bagi seorang manusia berfikir dalam usaha memahami dan mendalami informasi serta teknologi yang sedang berkembang. Melalui pendidikan manusia belajar membangun diri dan lingkungannya agar dapat bertahan dalam kehidupan yang semakin kompleks dan kompetitif.

Tingginya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat memungkinkan untuk memperoleh akses informasi dan menumbuhkan inovasi serta kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, penyerapan dan penguasaan terhadap teknologi akan semakin besar, yang pada gilirannya akan menumbuhkan produktivitas kerja yang tinggi.

Pendidikan merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Hal ini

dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan di sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yaitu :

1. Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan tidak merata pula tingkat pendidikan masyarakat.
2. Jumlah sarana dan tenaga pengajar yang sangat minim.
3. Jarak sekolah yang relatif jauh merupakan penghambat bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal.
4. Rendahnya motivasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
5. Alasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Berbagai upaya Pemerintah maupun pihak swasta di bidang pendidikan adalah menyediakan berbagai sarana fisik dan pengadaan tenaga pengajar, hal ini dilaksanakan guna mencapai tahap mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai dengan tahun 2007 jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Tanggamus menurut Dinas Pendidikan tahun 2007 meliputi Sekolah Dasar (SD) 663 unit, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 64 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) 15 unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5 unit. Sedangkan jumlah murid Sekolah Dasar 112.367 orang, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1.174 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 35.590 orang, Sekolah Menengah Atas 11.688 orang dan Sekolah Menengah Kejuruan 6.478 orang.

Berikut tabel banyaknya sekolah negeri menurut jenis sekolah di Kabupaten Tanggamus tahun 2007 :

TABEL 3.7
BANYAKNYA SEKOLAH NEGERI MENURUT JENIS SEKOLAH DI
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007

No	Kecamatan	Jenis Sekolah (Unit)				
		SD	MIN	SLTA	SMA	SMK
1	Wonosobo	25	-	2	1	-
2	Semaka	30	-	2	-	-
3	Bandar Negeri Semuong	14	-	2	-	-
4	Kotaagung	17	1	1	2	1
5	Pematang Sawa	14	-	3	-	-
6.	Kotaagung Timur	13	-	1	-	-
7.	Kotaagung Barat	13	-	1	-	-
8.	Pulaupanggung	32	-	2	1	-
9.	Ulubelu	31	-	3	-	-
10.	Air Nainingan	20	-	1	-	-
11.	Talangpadang	20	-	2	1	1
12.	Sumberejo	24	-	2	1	-
13.	Gisting	23	1	1	-	-
14.	Gunung Alip	13	-	-	-	-
15.	Pugung	39	-	2	-	1
16.	Pagelaran	42	2	4	1	-
17.	Sukoharjo	30	-	2	1	-
18.	Adiluwih	29	1	2	1	1
19.	Banyumas	17	-	1	-	-
20.	Pringsewu	38	1	4	2	-
21.	Ambarawa	23	-	2	1	-
22.	Gadingrejo	54	-	4	1	1
23.	Pardasuka	29	-	4	1	-
24.	Bulok	17	-	3	-	-
25.	Cukuhbalak	24	-	3	1	-
26.	Kelumbayan	11	-	4	-	-
27.	Limau	15	-	3	-	-
28.	Kelumbayan Barat	6	-	3	-	-
Jumlah		663	6	64	15	5

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

3.1.5. Keadaan Kesehatan

Salah satu kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus di bidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu fisik sumber daya manusia.

Rumah sakit merupakan salah satu prasarana paling vital yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus tahun 2007 memiliki rumah sakit sebanyak 6 buah, rumah bersalin 10 buah, Puskesmas Induk 30 buah, Puskesmas Pembantu 83 buah, Balai Pengobatan 39 dan Apotik 15 buah.

Sedangkan program Keluarga Berencana (KB) berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Pentingnya program Keluarga Berencana mengingat besarnya potensi angka kelahiran penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus sementara tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat terutama wanita-wanita produktif belum memadai. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bayi-bayi yang akan dilahirkan.

Tabel mengenai jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Tanggamus pada halan berikutnya.

TABEL 3.8
BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS
2007

No	Jenis Sarana Kesehatan (Nama)	Jumlah (Unit)
1	Rumah Sakit	6
2	Rumah Bersalin	10
3	Puskesmas Induk	30
4	Puskesmas Pembantu	83
5	Balai Pengobatan	39
6	Apotik	15
	Jumlah	183

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Tanggamus masih sangat minim, sehingga mengakibatkan banyak daerah-daerah dan warga masyarakat yang tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara memadai. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perlu adanya penambahan anggota tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat yang berada di daerah-daerah yang relatif sangat jauh dari sarana kesehatan yang tersedia. Perlunya penambahan tenaga-tenaga kesehatan di Kabupaten Tanggamus mengingat wilayahnya yang relatif luas dan masih rendahnya tingkat kesehatan terutama masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Tetapi yang menjadi salah satu penghambat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga disebabkan oleh tidak bersedianya para tenaga-tenaga kesehatan seperti dokter, bidan ataupun perawat untuk ditempatkan di daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat kota, terutama dari pusat ibukota kabupaten. Kenyataan ini merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius dan intensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

TABEL 3.9
BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN DAN UNIT KERJA DI KABUPATEN
TANGGAMUS 2007

No	Tenaga Kesehatan (Nama)	Jumlah (Jiwa)
1	Dokter Ahli	9
2	Dokter Umum PNS	32
3	Bidan	312
4	Perawat	157
Jumlah		510

Sumber : Kabupaten Tanggamus Dalam Angka 2008

3.1.6 Keadaan Perekonomian

Indikator perekonomian yang dikenal secara luas untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB tersebut selain dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dari kenaikan PDRB atas dasar konstan 2000.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus tahun 2005 sebesar 4,74 persen ada penurunan nilai dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,57 persen. Berbagai upaya pembangunan ekonomi dilakukan Pemerintah, tetapi belum meningkatkan pertumbuhan perekonomian bila dibandingkan tahun lalu. Hal ini dapat dipahami karena pada tahun tersebut adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh hampir pada semua sektor.

TABEL 3.10
PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
TANGGAMUS, TAHUN 2002-2005

Tahun	PDRB (Juta Rp)		Laju pertumbuhan (Persen)
	Harga berlaku	Harga Konstan	
2002	2.583.857	2.583.857	3,34
2003	2.978.655	2.536.581	4,16
2004	3.309.003	2.683.921	5.57
2005	3.625.854	2.811.005	4,74

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia BPS Kabupaten Tanggamus 2006

Pada perhitungan PDRB, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi/ bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, angkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lain.

Peranan sektor-sektor diatas dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanggamus hingga tahun 2005 sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang paling besar (48,90 persen) diikuti sektor jasa-jasa (14,49 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan rumah makan (13,17 persen).

Salah satu sisi melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan perkapita yang ditunjukkan oleh nilai PDRB perkapita. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus mencapai 4,008 juta rupiah, dan pada tahun 2005 sudah mencapai 4,305 juta rupiah.

TABEL 3.11
PDRB PERKAPITA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2002-2005

Tahun	PDRB (Ribu Rp)	
	Harga berlaku	Harga Konstan
2002	3.226.152	3.011.002
2003	3.717.464	3.165.740
2004	4.007.609	3.250.559
2005	4.304.808	3.337.376

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia BPS kabupaten Tanggamus 2006

3.1.7. Keadaan Pemerintahan

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan dan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya yang ditunjuk sebagai Bupati Tanggamus untuk yang pertama kali adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Pemerintahan di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2003. Pada tanggal 15 Januari 2008 oleh Menteri Dalam Negeri dilantik pasangan Bambang Kurniawan, S.T. dan Sujadi Sadad sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Tanggamus.

Secara administratif ketika terbentuk, Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan Wilayah Perwakilan Kecamatan. Sampai dengan saat ini Kabupaten Tanggamus telah berdiri 28 (dua puluh delapan) kecamatan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan Penggabungan dari dua SKPD yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Badan

Keuangan Daerah, yang disingkat dengan Dinas PPK dan AD. Ada kesamaan beberapa tugas dan fungsi dari kedua SKPD tersebut yang dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih tugas serta membutuhkan dana yang cukup besar untuk operasional dari kedua SKPD tersebut. Satu SKPD membutuhkan dana kurang lebih satu milyar rupiah.

Adanya kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua SKPD tersebut, juga untuk penghematan biaya maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana Implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggabungkan kedua SKPD tersebut menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Program Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inofatif serta produktif. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus dalam jangka panjang. Keadaan masa depan tersebut haruslah suatu kondisi yang diinginkan dan menantang sehingga memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu visi organisasi harus realistis dan kredibel.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan menunjang visi Kabupaten Tanggamus yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Tangguh, Sejahtera Dan Agamis Dalam Suasana Dan Tatanan Daerah Yang Aman, Tertib, Lestari

Dan Mandiri". Misi merepresentasikan suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Secara ringkas pernyataan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Sejalan dengan visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus, maka misi yang telah dirumuskan dituangkan dalam pernyataan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengembangan kehidupan bermasyarakat yang bermoral dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila.
2. Menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai daerah yang aman, damai dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem dan model ekonomi kerakyatan (pertanian dalam arti luas, agroindustri dan pertambangan).
4. Menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai pusat pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Iman dan Taqwa, untuk mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
5. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

6. Mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, kreatif dan produktif.
7. Mewujudkan Kabupaten Tanggamus menjadi daerah transit dan kawasan wisata.

Tujuan merupakan penjabaran visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri melalui pengembangan sektor andalan;
2. Mewujudkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab;
3. Terpeliharanya lingkungan hidup secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat setempat;
4. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
5. Membangun dan mengembangkan SDM yang handal, beriman, dan bertaqwa.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus melalui tindakan-tindakan yang dilaksanakan setiap tahun untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan

datang. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus yaitu :

1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas.
2. Meningkatkan koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif, efisien dan berkesinambungan.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Kebijakan merupakan arah yang diambil setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelum menetapkan kebijakan yang akan diambil agar sesuai dengan tuntutan jaman terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap lingkungan strategis agar dapat diidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus. Selain itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asse Kabupaten Tanggamus.

Analisis lingkungan internal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Kekuatan :
 - 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung;

- 2) Potensi Sumber Daya Manusia yang menunjang baik kuantitas maupun kualitas;
 - 3) Adanya dukungan dana yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asett Kabupaten Tanggamus;
 - 4) Dasar hukum organisasi mengenai tugas pokok dan fungsi yang jelas.
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kelemahan :
- 1) Belum akuratnya data yang ada;
 - 2) Koordinasi antar dinas/ Instansi belum optimal;
 - 3) Sistem Informasi belum berkembang dengan baik;
 - 4) Akses Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus ke Pusat masih kurang;
 - 5) Koordinasi antar bidang belum optimal;
 - 6) Komitment pimpinan dalam mendukung peningkatan SDM lemah;
 - 7) Tidak konsistennya kebijakan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;

Analisis lingkungan eksternal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus yaitu :

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Peluang :
 - 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Berkembangnya Sistem informasi berupa data dan informasi tentang pemerintahan yang dapat diakses melalui Internet;
 - 3) Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan.
2. Faktor-Faktor yang menjadi Ancaman :
 - 1) Sistusi politik yang kurang kondusif;

- 2) Situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif untuk melaksanakan pembangunan;
- 3) Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensi, yang merupakan ancaman bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis diatas maka kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
2. Peningkatan Program Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peningkatan Pengelolaan Aset.

3.2.2. Program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

RPJP Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan selanjutnya RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Selain itu, disebutkan pula bahwa RPJPD yang telah ada wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional dan RPJMD yang telah ada juga wajib disesuaikan dengan RPJPD yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dan juga disesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD maka

program pembangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

- 1) Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan;
- 3) Penyusunan Rekapitulasi Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 4) Pengendalian, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 5) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD;
- 6) Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD;
- 7) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan;
- 8) Penyusunan Perencanaan Kinerja, Tata Usaha Keuangan dan Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 9) Penyusunan KUA dan PPA;
- 10) Penyusunan KUA dan PPA Perubahan;
- 11) Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyusunan RKA-SKPD;
- 12) Peningkatan Pembinaan Administrasi Gaji;
- 13) Penatausahaan Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan;
- 14) Pembinaan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- 15) Belanja Bantuan Keuangan Daerah;
- 16) Intensifikasi Pengelolaan PAD dan PBB;
- 17) Peremajaan/Updating Data Objek Pajak Daerah;
- 18) Perhitungan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah yang Rasional;
- 19) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- 20) Penyusunan Program Bidang Pendapatan;
- 21) Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah.

2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Selain program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanggamus, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama SKPD lain serta Instansi terkait, antara lain :

- 1) Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Tanggamus;
- 2) Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD;
- 3) Penyusunan APBD-P;
- 4) Penyusunan APBD;
- 5) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bagi SKPD;
- 6) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah kepada Bendaharawan Pengeluaran dan PPK-SKPD se Kabupaten Tanggamus;
- 7) Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- 8) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

3. Program Dan Kegiatan Kewilayahan

Program dan kegiatan kewilayahan yaitu :

- 1) Penyampaian SPPT-PBB sampai ke Wajib Pajak dan Bulan Bhakti PBB;
- 2) Identifikasi Wajib Pajak PPJ dan Pemetaan Titik Lampu Penerangan Jalan

3.2.3. Keadaan Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Penyelenggaraan tugas di lingkungan suatu organisasi sangatlah tergantung dari keberadaan perangkat organisasi/ pegawai organisasi itu sendiri, selain ditunjang oleh faktor-faktor pendukung. Begitu pula dengan

organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah. Bagaimanapun juga baiknya faktor-faktor pendukung, bila tidak ditunjang oleh kualitas para pegawainya atau aparatnya, maka jalannya organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset itu sendiri.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus yang berlaku untuk tahun 2008, terdapat 72 orang Pegawai Negeri Sipil yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus. yang terdiri dari :

1. Satu orang Kepala Dinas
2. Satu orang Sekretaris
3. Lima orang Kepala Bidang
4. Tiga orang Kepala Sub Bagian
5. Sepuluh orang Kepala Seksi.
6. Enam orang tenaga honorer

Untuk mengetahui keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus, data aparat Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan pada tahun 2008 pada lampiran II.

Pada umumnya pendidikan dipercaya dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan pegawai atau aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dihadapinya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, niscaya semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah pula kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Walaupun

demikian hal ini tidaklah mutlak, karena ada juga orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi namun tingkat pendidikannya rendah.

Kemampuan pegawai/ aparat Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya sedikit banyak akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan latihan struktural yang dimiliki oleh aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tersebut. Disamping itu juga pengalaman yang dimiliki baik itu yang bersifat formal maupun nonformal.

Untuk mengetahui mengenai keadaan pendidikan aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus, berikut disajikan data Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus berdasarkan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :

TABEL 3.12
TINGKAT PENDIDIKAN APARAT DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN
2008

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Sarjana	39
2.	Diploma	6
3.	SLTA	27
4.	SLTP	-
Jumlah		72

Sumber : Dinas PPK dan AD Kabupaten Tanggamus 2008

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus yang dominan adalah lulusan Sarjana sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, diikuti oleh lulusan SLTA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan lulusan Diploma 6 (Enam) orang. Untuk lulusan SLTP di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus tidak ada. Jika dilihat dari keterangan di atas, sumber daya manusia (SDM) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus tergolong baik. Sebagian besar lulusan sarjana berada pada *middle management* dan *top management*. Sehingga strata manajemen yang mengambil keputusan sudah benar-benar diduduki oleh orang yang berkompeten, paling tidak dari segi pendidikannya. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung sistem dan kinerja Pegawai Negeri Sipil atau aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus dalam menyelenggarakan tugas untuk mengelola pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus dengan baik dan lancar.

3.2.4. Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus

Sarana dan prasarana kerja yang terdapat dalam sebuah organisasi Pemerintahan akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai atau aparat Pemerintah tersebut. Apabila keberadaannya memadai maka akan mendorong suasana kerja yang nyaman, sehingga bisa mencapai apa yang telah menjadi sasaran. Sebaliknya apabila kurang memadai maka akan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

Sarana Transportasi sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Tanggamus. Berikut Tabel sarana Transportasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus :

TABEL 3.13
SARANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAHUN 2008

No.	Sarana Transportasi	Jumlah (Buah)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik
2	Minibus Toyota Kijang	2	Baik
3	Pikep	1	Baik
4	Kendaraan Roda 2	2	Baik
5	Mesin tik	7	Baik
6	Lemari Kayu	4	Baik
7	Lemari Besi	4	Baik
8	Air Conditioner	2	Baik
9	Telephone	2	Baik
10	Meja Kerja	35	Baik
11	Kursi Kerja	120	Baik
12	Meja Kursi tamu	4	Baik
13	Meja Rapat Panjang	6	Baik
14	Rak arsip	3	Baik
15	Komputer	4	Baik
16	Ruang rapat	1	Baik
17	Papan struktur organisasi	2	Baik
18	Papan Monografi	4	Baik

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Papan tulis <i>White Board</i>	2	Baik
20	Brangkas	3	Baik
21	Kipas angin	2	Baik

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008

Berdasarkan data tabel 3.13 tersebut dapat diketahui dari segi kondisi, sarana pendukung kerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus secara umum dalam kondisi baik. Namun mungkin karena ada yang sudah lama, kinerja sarana tersebut menjadi tidak memadai lagi untuk tugas-tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus, yang semakin bertambah kompleks. Disamping itu seringnya biaya operasional untuk kegiatan perkantoran baik yang secara langsung berhubungan dengan sarana tersebut maupun tidak, tidak mencukupi untuk satu tahun anggaran. Hal ini sering dikeluhkan oleh aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus. Tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan tugas kantor mereka sering mengeluarkan biaya dari kantong sendiri.